



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BKAD)
KABUPATEN TAPIN**



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB : PENUTUP
- (2) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. RSUD Datu Sanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- q. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Kecamatan Piani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Kecamatan Lokpaikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan apin Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- ff. Kecamatan Bakarangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Candi Laras Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Hatungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Salam Babaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Tapin Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Tapin Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Binuang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Bungur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ss. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**
Pj. BUPATI TAPIN, **7**



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen yang memuat Rencana Kerja yang terdiri dari gambaran umum, tugas pokok serta visi, misi dan sasaran kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selama satu Tahun yang telah memuat Indikator Kinerja Utama yang baru pada BKAD

Disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun isinya, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.

Rantau, April 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin,



HARIS BATHILAH, SE, M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19740626 200501 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan SKPD	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 36
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi	36
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD BKAD	37
3.3 Program dan kegiatan	38
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 44
 BAB V PENUTUP	 50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin s/d Tahun 2023	8
Tabel 2.2	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	22
Tabel 2.3	
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah	26
Tabel 3.1	
Tujuan dan Sasaran RPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025	37
Tabel 3.3	
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025	38
Tabel 4.1	
Rumusan Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD BKAD Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD BKAD sebagai merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BKAD yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD BKAD, maka disusunlah Renja BKAD tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 SKPD BKAD sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
24. Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2025 bagi SKPD BKAD, sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RPD Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2025, yaitu:

- 1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BKAD;
- 2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan BKAD;
- 3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
- 4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PD BKAD dan Kabupaten Tapin Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

- 2.4 Review terhadap Rancangan PD Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sampai dengan akhir Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sampai dengan setelah perubahan sebesar Rp.17.679683.928,00 dengan realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp.15.656.498.285,00 dengan capaian 88.56%

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin s/d Tahun 2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	
3	4	7			12			13 = (12/7x100)	
		K	Rp		K	Rp		K	Rp
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Nilai	13.202.782.595	73,25	Nilai	12.103.597.722	91,56	91,67
	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	60	Nilai		45,58	Nilai		75,97	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	100	%	31.671.500	100	%	29.652.200	100,00	93,62
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	3.801.500	4	Dokumen	3.423.000	100,00	90,04

5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	27.870.000	7	Dokumen	26.229.200	100,00	94,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	92,08
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	ST
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6.515.404.242	100,00	%	6.057.955.083	100,00	92,98
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	32	Orang/Bulan	6.476.972.242	32	Orang/Bulan	6.022.495.683	100,00	92,98
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.382.000	1	Dokumen	3.899.400	100,00	88,99
5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	34.050.000	18	Dokumen	31.560.000	100,00	92,69
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	91,55
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	ST

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	54.094.450	0,00	%	0	100,00	0,00
5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	Orang	54.810.359	0	Orang	0	100,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								0,00	0,00
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								SR	SR
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100	%	3.731.540.057	100,00	%	3.501.294.303	100,00	93,83
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	95.248.588	1	Paket	93.199.200	100,00	97,85
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	485.502.053	1	Paket	465.160.200	100,00	95,81
5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	22.672.760	1	Paket	21.617.500	100,00	95,35
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	381.480.474	1	Paket	352.471.690	100,00	92,40

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	295.103.472	1	Paket	293.251.000	100,00	99,37
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	55.732.840	1	Paket	48.573.000	100,00	87,15
5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	129.190.870	1	Laporan	110.716.000	100,00	85,70
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	2.266.609.000	1	Laporan	2.116.305.713	100,00	93,37
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	93,37
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	ST
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100	%	378.840.214	100,00	%	345.460.000	100,00	91,19
5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64	Unit	378.840.214	64	Unit	345.460.000	100,00	91,19
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	91,19
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	ST
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.173.041.780	100,00	%	952.780.207	100,00	81,22

5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	13.852.400	12	Laporan	12.300.000	100,00	88,79
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	416.421.660	12	Laporan	392.888.817	100,00	94,35
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12	Laporan	742.767.720	12	Laporan	547.591.390	100,00	73,72
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	85,62
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	T
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	1.317.474.443	100,00	%	1.216.455.929	100,00	92,33
5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	125.232.183	6	Unit	121.277.194	100,00	96,84

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	60.620.000	12	Bulan	47.310.000	100,00	78,04
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	514.137.500	12	Bulan	464.200.900	100,00	90,29
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	93,96
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	ST
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								85,71	77,88
Predikat Kinerja Kegiatan								T	T
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	Nilai	2.703.578.033	64,96	Nilai	2.256.022.656	86,61	83,45
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu	100	%	1.151.467.444	100,00	%	994.090.500	100,00	86,33
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	Dokumen	3.469.900	2	Dokumen	70.072.000	100,00	95,38

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	Dokumen	72.769.470	2	Dokumen	67.949.400	100,00	93,38
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	58	Dokumen	40.364.500	58	Dokumen	39.795.900	100,00	98,59
5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA SKPD yang yang diverifikasi	58	Dokumen	11.605.200	58	Dokumen	11.012.400	100,00	94,89
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang yang diverifikasi	58	Dokumen	37.025.910	58	Dokumen	36.975.000	100,00	99,86
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang yang diverifikasi	58	Dokumen	51.166.990	58	Dokumen	49.353.300	100,00	96,46
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	4	Dokumen	307.779.583	4	Dokumen	265.302.800	100,00	86,20

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	4	Dokumen	156.291.892	4	Dokumen	148.911.300	100,00	95,28
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	4	Dokumen	400.993.999	4	Dokumen	304.718.400	100,00	75,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	92,89
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	ST
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan	100	%	930.264.165	100	%	782.453.356	100,00	84,11
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen koordinasi pengelolaan kas daerah	52	Dokumen	175.202.200	52	Dokumen	153.537.693	100,00	87,63
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil penerbitan anggaran kas dan SPD	4	Dokumen	43.533.692	4	Dokumen	29.000.000	100,00	66,62
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	2	Dokumen	122.369.700	2	Dokumen	107.814.750	100,00	88,11

5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	Dokumen	85.339.862	2	Dokumen	76.815.000	100,00	77,21
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17	Dokumen	257.640.800	17	Dokumen	247.026.400	100,00	95,88
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116	Orang	246.177.911	116	Orang	168.259.513	100,00	68,35
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								85,71	70,94
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								T	S

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu	100	%	621.846.424	100,00	%	479.478.800	100,00	77,11
5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	106.491.286	12	Laporan	96.299.000	100,00	90,43
5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1	Dokumen	38.539.133	1	Dokumen	38.433.250	100,00	99,73
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	Laporan	20.461.530	18	Laporan	20.366.150	100,00	99,53
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1	Laporan	51.029.000	1	Laporan	50.801.250	100,00	99,55

5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	71.496.245	2	Dokumen	71.255.800	100,00	99,66
5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	48.353.400	1	Dokumen	0	0,00	0,00
5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	48.353.400	0	Dokumen	7.637.000	100,00	15,79
5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90	Orang	237.122.430	90	Orang	194.686.350	100,00	82,10
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								87,50	73,35
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								T	S
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								100,00	82,52
Predikat Kinerja Kegiatan								ST	T

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	Nilai	1.773.323.300	64,96	%	1.296.877.907	86,61	73,13
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100	%	942.769.500	100,00	%	893.240.121	100,00	94,75
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga (SSH)	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1	Dokumen	398.571.700	1	Dokumen	372.120.000	100,00	93,36
5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	1	Dokumen	10.065.957	1	Dokumen	8.444.757	100,00	83,89
5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	35.646.200	2	Dokumen	35.452.000	100,00	99,46
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Laporan	143.069.450	12	Laporan	104.118.400	100,00	72,77
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12	Laporan	36.154.670	12	Laporan	20.780.500	100,00	57,48
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Laporan	139.525.180	12	Laporan	89.155.000	100,00	63,90

5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	393.899.780	1	Laporan	160.638.300	100,00	40,78
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	297.662.600	1	Dokumen	231.554.700	100,00	77,79
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90	Laporan	46.861.320	90	Laporan	46.063.400	100,00	98,30
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	24	Laporan	20.171.200	24	Laporan	17.891.200	100,00	88,70
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten/Kota	90	Orang	251.695.243	90	Orang	210.659.650	100,00	83,70
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)								100,00	78,19
Predikat Kinerja Sub Kegiatan								ST	T
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)								86,61	73,13
Predikat Kinerja Kegiatan								T	S
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)								84,71	82,75
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)								T	T

Dari tabel 2.1 diatas dapat di informasikan yaitu sebagian besar program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 sudah memenuhi target kinerja yang di tetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang pencapaian target nya masih belum maksimal terdapat beberapa faktor yaitu :

- Pada program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mana tahun ini ditunda pembuatannya, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait aturan-aturan yg berhubungan dengan sisdur akuntansi dan pelaporan keuangan pemda, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan ke tahun berikutnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian kinerja tahun 2023 BKAD dengan indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah 64,96, untuk indikator kedua “Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 73,25 atau predikat BB, dan indikator “Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah mencapai 45,58.

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD BKAD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin

NO	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		standar nasional												
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			75	80	81	82	64,96				75	81	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A	BB				A	A	

3	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah			60	65	66	67	45,58					65	66	
---	--	--	--	----	----	----	----	-------	--	--	--	--	----	----	--

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BKAD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis BKAD sebagai berikut:

1. Belum optimal/terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di SKPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten tapin
2. Masih banyak aset tanah yang belum memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Laporan barang pengguna semesteran dan tahunan SKPD tidak disampaikan tepat waktu
4. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi pada tahun-tahun yang akan datang.

Isu-isu tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian sasaran daerah serta visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan peran serta aktif semua pihak agar di tahun 2025 isu-isu yang bersifat menghambat dapat mulai berkurang. Adapun isu-isu yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah :

1. Koordinasi dengan TAPD, Badan Terkait dan DPRD
2. Mengadakan sosialisasi / Bimtek tentang penganggaran kepada semua komponen SDM penyusun anggaran di SKPD
3. Kepala SKPD konsisten dengan Anggaran Kas dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah dibuat dalam rangka melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik sehingga penyelesaian pekerjaan tidak sampai ke akhir tahun
4. Kepala SKPD konsisten dengan Anggaran Kas dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah dibuat dalam rangka melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik sehingga penyelesaian pekerjaan tidak sampai ke akhir tahun
5. Pemerintah daerah dalam hal ini pengguna barang SKPD harus selalu proaktif untuk berkoordinasi dengan BPN Kab.Tapin terkait proses penerbitan sertifikat tanah milik daerah
6. Perlu dilakukanya pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah di lingkup SKPD

- 7. Telah dilakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola barang SKPD melalui Bimtek yang difasilitasi oleh BKAD dengan menghadirkan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
- 8. Meningkatkan wawasan/kualitas aparatur pengelola keuangan terhadap akuntansi berbasis akrual

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKAD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKAD berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen AKIP (Dengan Satuan:%)	100	12.043.371.634	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen AKIP (Dengan Satuan:%)	100	12.043.371.634	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	98				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	98		
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100		
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100				persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	37.632.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	37.632.200	
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100				Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100		
		Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100		

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	3.762.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	3.762.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	33.870.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	33.870.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	6.659.334.683	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	6.659.334.683	
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standarPersentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(Dengan Satuan:%)	100				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standarPersentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(Dengan Satuan:%)	100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	32	6.620.902.683	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	32	6.620.902.683	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.382.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.382.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	34.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	34.050.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	3.605.238.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	3.605.238.600,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85				Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85		
		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100				Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	133.221.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	133.221.700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	509.676.240,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	509.676.240,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	9.451.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	9.451.500,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	354.140.300,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	354.140.300,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	151.194.160	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	151.194.160	
Penyediaan Bahan/Material	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	55.698.200	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	55.698.200	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	99.022.700	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	99.022.700	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.292.833.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.292.833.800	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Un)	85	442.926.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Un)	85	442.926.100	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	13	442926100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	13	442926100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	93.532.138	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	93.532.138	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	15.338.900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	15.338.900	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	349.074.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	349.074.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	571.913.238	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	571.913.238	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85	361.913.913	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85	361.913.913	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	6	123.572.330	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	6	123.572.330	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	40	15.299.464.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	40	15.299.464.300	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	85.346.940	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	85.346.940	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	4.060.931.440	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	4.060.931.440	

		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100				Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100		
		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100				Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.924.742.840	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.924.742.840	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	74.038.800	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	74.038.800	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	73.195.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	73.195.800	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	10.328.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	10.328.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	16.560.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	16.560.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.025.910	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.025.910	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.354.860	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.354.860	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	864.764.240	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	864.764.240	

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	146.614.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	146.614.000	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	4	664.861.480	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	4	664.861.480	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	1.474.894.900	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	1.474.894.900	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	295.098.650	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	295.098.650	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	125.184.400	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	125.184.400	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	87.369.600	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	87.369.600	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dengan Satuan:Dokumen)	2	135.339.600	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dengan Satuan:Dokumen)	2	135.339.600	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab.Tapin	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	427.640.800	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab.Tapin	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	427.640.800	

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	116	404.262.200	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	116	404.262.200	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	661.293.700	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	661.293.700	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	142.235.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	142.235.000	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.925.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.925.000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	18	21.847.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	18	21.847.500	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	94.525.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	94.525.000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	79.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	79.200.000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.000	

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.400	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.400	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	249.410.800	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	249.410.800	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil yang di selesaikan (Dengan Satuan:%)	100	111.286.505.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil yang di selesaikan (Dengan Satuan:%)	100	111.286.505.000	
		Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100				Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100		
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	5.000.000.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	5.000.000.000	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	78.559.778.800	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	78.559.778.800	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000.000	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.726.726.200	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.726.726.200	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960	

Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960	
Penyusunan Standar Harga	Kab.Tapin	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	386.173.910	Penyusunan Standar Harga	Kab.Tapin	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	386.173.910	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.466.200	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.466.200	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	40.966.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	40.966.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	173.054.100	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	173.054.100	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	13.473.800	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	13.473.800	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	171.231.450	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	171.231.450	
Penilaian Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	333.820.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	333.820.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	354.878.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	354.878.000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	90	89.736.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	90	89.736.000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	24	22.687.900	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	24	22.687.900	

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	152.202.600	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	152.202.600	
Total				17.846.993.034				Total	17.846.993.034	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) RPJPN 2025-2045 adalah Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan.

Tema RKP Nasional 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi dan Misi yang diacu pada RKPD Provinsi ini adalah Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Daerah yang dimaksud adalah Kalimantan Selatan MAJU (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara. Adapun 5 misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Membangun sumber daya yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata
3. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian
4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik
5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan dan bencana

Maka arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 ini adalah Pengembangan Kualitas SDM dan Prasarana Wilayah Mendukung Perekonomian Berkelanjutan Berpedoman pada Pencapaian Pembangunan Global (SDGs). Adapun tema yang ditetapkan adalah Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD BKAD

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 merupakan penjabaran dari misi ke-5 yang tercantum pada RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 yaitu : “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)” hal ini sangat sejalan dengan visi BKAD yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah keseluruhan tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RPD Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2025

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
2	Meningkatnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program untuk rencana kerja pada tahun anggaran 2025 di BKAD sebanyak 3 (tiga) program yaitu 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program pendukung. Sedangkan kegiatannya sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan BKAD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 11 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 58 Sub Kegiatan
Pagu Indikatif APBD	: Rp.17.846.993.034,00

Program dan kegiatan SKPD BKAD Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosisnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Komponen AKIP (Dengan Satuan:%)	100	12.043.371.634

		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	98	
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	37.632.200
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	
		Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	3.762.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	33.870.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	6.659.334.683
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standarPersentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(Dengan Satuan:%)	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	32	6.620.902.683
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.382.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	34.050.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	3.605.238.600,00
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85	
		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	133.221.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	509.676.240,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	9.451.500,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	354.140.300,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	151.194.160
Penyediaan Bahan/Material	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	55.698.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	99.022.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.292.833.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Un)	85	442.926.100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	13	442926100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	93.532.138
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	15.338.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	349.074.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	571.913.238
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85	361.913.913
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	6	123.572.330
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	40	15.299.464.300
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	85.346.940
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	4.060.931.440
		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	
		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.924.742.840
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	74.038.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	73.195.800
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	10.328.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	16.560.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kab.Tapin	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.025.910
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.354.860
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	864.764.240
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	146.614.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	4	664.861.480
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	1.474.894.900
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	295.098.650
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	125.184.400
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	87.369.600
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dengan Satuan:Dokumen)	2	135.339.600
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab.Tapin	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	427.640.800
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	116	404.262.200

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	661.293.700
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	142.235.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.925.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	18	21.847.500
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	94.525.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	79.200.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.400
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	249.410.800
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil yang di selesaikan (Dengan Satuan:%)	100	111.286.505.000
		Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	5.000.000.000
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	78.559.778.800
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.726.726.200

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960
Penyusunan Standar Harga	Kab.Tapin	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	386.173.910
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.466.200
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	40.966.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	173.054.100
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	13.473.800
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	171.231.450
Penilaian Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	333.820.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	354.878.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	90	89.736.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	24	22.687.900
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	152.202.600
Total				17.846.993.034

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program BKAD Kabupaten Tapin merupakan program penunjang RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Tapin. Rencana program penunjang beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan BKAD Kabupaten Tapin kedalam rencana kegiatan untuk setiap program penunjang tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program penunjang ini didasarkan atas strategi dan kebijakan BKAD Kabupaten Tapin. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Tapin.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program penunjang yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Rumusan Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tapin											
Badan Keuangan dan Aset Daerah											
Kode	Urusan/Bidang	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja/Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Pagu Indikatif menurut Sumber Dana tahun 2025 (Rp)			Perkiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan/Program/Kegiatan				Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
	Semua Urusan										
	Semua Bidang										
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	4.060.931.440	0	0	100	3.386.861.179
					Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100		0		100	
					Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100		0		100	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Persentase pemenuhan anggaran mandatory spending dan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.924.742.840	0	0	100	1.637.397.671
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	74.038.800	0	0	2	73.470.100
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	73.195.800	0	0	2	72.769.700
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	10.328.000	0	0	58	10.328.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	16.560.000	0	0	58	10.286.800
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.025.910	0	0	58	37.025.910
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	58	37.354.860	0	0	58	37.067.110
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	864.764.240	0	0	4	864.764.240

5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	146.614.000	0	0	4	146.291.812
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	4	664.861.480	0	0	4	385.393.999
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Persentase dokumen laporan Bendahara Umum Daerah yang diterbitkan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	1.474.894.900	0	0	100	1.200.407.550
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	295.098.650	0	0	12	224.859.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	125.184.400	0	0	4	124.716.109
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	87.369.600	0	0	2	15.369.700
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dengan Satuan:Dokumen)	2	135.339.600	0	0	2	135.339.862
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	427.640.800	0	0	1	427.640.800
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	116	404.262.200	0	0	116	272.482.079
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	661.293.700	0	0	100	549.055.958
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	142.235.000	0	0	12	81.491.553
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.925.000	0	0	1	23.539.400
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	18	21.847.500	0	0	18	20.461.530
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	94.525.000	0	0	1	101.029.000

5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	79.200.000	0	0	2	71.496.245
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.000	0	0	1	48.353.400
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	24.575.400	0	0	1	48.353.400
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	249.410.800	0	0	90	154.331.430
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960	0	0	100	1.516.853.730
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.742.689.960	0	0	100	1.516.853.730
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	386.173.910	0	0	1	361.273.700
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	4.466.200	0	0	1	11.416.200
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	40.966.000	0	0	2	84.418.200
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	173.054.100	0	0	12	121.619.450
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	13.473.800	0	0	12	13.494.670
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	171.231.450	0	0	12	195.975.180
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	333.820.000	0	0	1	113.245.480
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	354.878.000	0	0	1	375.452.800
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	90	89.736.000	0	0	90	37.511.320
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	24	22.687.900	0	0	24	20.171.200
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin, BKAD, SKPD	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	90	152.202.600	0	0	90	182.275.530
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai Komponen AKIP (Dengan Satuan:%)	100	12.043.371.634	0	0	100	10.408.018.009

					Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	98		0		100	
					Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100		0		95	
					persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	37.632.200	0	0	100	31.671.500
					Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100		0	0	100	
					Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100		0		100	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD, Bappelitbang, Inspektorat	BKAD, Bappelitbang, Inspektorat	Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	3.762.200,00	0	0	4	3.801.500
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD, Bappelitbang, Inspektorat	BKAD, Bappelitbang, Inspektorat	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	33.870.000,00	0	0	8	27.870.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	6.659.334.683	0	0	100	6.469.473.373
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standarPersentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)(Dengan Satuan:%)	100		0		100	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD, Inspektorat	BKAD, Inspektorat	Kab.Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	32	6.620.902.683	0	0	32	6.431.041.373
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD, Inspektorat	BKAD, Inspektorat	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.382.000	0	0	1	4.382.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKAD, Inspektorat	BKAD, Inspektorat	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	34.050.000	0	0	18	34.050.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	3.605.238.600,00	0	0	85	2.293.677.952
					Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85		0		85	
					Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	100		0		100	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	133.221.700	0	0	1	133.238.820
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	509.676.240,00	0	0	1	458.206.053
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	9.451.500,00	0	0	1	9.532.760

5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	354.140.300,00	0	0	1	426.351.554
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	151.194.160	0	0	1	149.674.305
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	55.698.200	0	0	1	55.732.840
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	99.022.700	0	0	1	99.037.620
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.292.833.800	0	0	1	961.904.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Un)	85	442.926.100	0	0	85	177.120.000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	13	442926100	0	0	13	177.120.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik (Dengan Satuan:%)	85	93.532.138	0	0	85	1.082.963.720
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	15.338.900	0	0	12	22.607.400
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	349.074.000	0	0	12	347.933.600
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	571.913.238	0	0	12	712.422.720
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85	361.913.913	0	0	85	353.111.464
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	6	123.572.330	0	0	6	123.630.404
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	40	15.299.464.300	0	0	40	144.050.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	BKAD	Kab.Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	85.346.940	0	0	1	85.431.060
						17.846.993.034				15.311.732.918	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) PD BKAD Kabupaten TAPIN tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PD BKAD dan RPD Kabupaten TAPIN Tahun 2025 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD BKAD Kabupaten TAPIN.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD BKAD, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD BKAD maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja PD BKAD Kabupaten TAPIN tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2024-2026.


Pj. BUPATI TAPIN,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd